

Industri Tekstil: Tantangan Restrukturisasi

Rin Purwani BUDI*

Keprihatinan tentang kemungkinan hancurnya industri tekstil nasional telah banyak didengar. Masalah tekstil apabila ditelusuri, ternyata memiliki cakrawala luas. Tulisan ini secara garis besar hendak mengkaji permasalahan industri tekstil dari dua segi, yaitu dalam negeri dan perdagangan tekstil internasional. Pertama-tama akan disoroti latar belakang pendirian industri tekstil di Indonesia. Kemudian akan ditinjau permasalahan yang dihadapi baik dari dalam maupun luar negeri, dan kaitannya dengan masalah proteksi. Bagian akhir tulisan ini mengupas tantangan restrukturisasi dalam industri tekstil Indonesia.

ALASAN PENDIRIAN INDUSTRI TEKSTIL: SUBSTITUSI IMPOR

Industri Tekstil Indonesia didirikan mula-mula untuk substitusi impor dalam rangka memenuhi kebutuhan sandang nasional. Tetapi kenaikan produksi tekstil yang cukup pesat sejak tahun 1970-an ternyata juga telah meningkatkan ekspor tekstil Indonesia kecuali untuk beberapa tahun seperti yang terlihat pada Tabel 1. Dalam tahun 1970 jumlah ekspor tekstil Indonesia adalah US\$774.300 sedangkan dalam tahun 1980 telah meningkat menjadi US\$134.800.000 dan tahun 1984 diperkirakan naik dengan lebih cepat lagi menjadi US\$350.000.000.

Kenaikan produksi dan ekspor tekstil yang pesat ini tidak mengherankan, yaitu antara lain merupakan akibat kebijakan pemerintah berupa proteksi terhadap industri muda tersebut. Menurut Martin Wolf dan kawan-kawan¹

*Staf CSIS.

¹M. Wolf, et al., "Cost of Protecting Jobs in Textiles and Clothing," *Thames Essays*, No. 37, Trade Policy Research Centre, London, 1984.

Tabel 1

EKSPOR TEKSTIL INDONESIA

Tahun	(dalam US\$)
1970	774.300
1971	1.334.100
1972	1.226.200
1973	1.796.100
1974	3.917.000
1975	4.994.000
1976	5.572.000
1977	5.661.000
1978	18.300.000
1979	99.300.000
1980	134.800.000
1981	110.300.000
1982	160.400.000
1983	277.000.000
1984	350.000.000*

* Angka perkiraan.

Sumber: Biro Pusat Statistik, lihat juga *Business News*, 4160, 21 Januari 1985.

yang mengadakan studi industri tekstil pada umumnya, pemberian proteksi ini sering kali dibenarkan terutama dengan alasan penyerapan tenaga kerja di samping alasan lain seperti alasan pertumbuhan dan neraca pembayaran. Alasan-alasan ini masih perlu dipertanyakan.² Alasan lain yang juga penting dalam pertimbangan pemberian proteksi adalah alasan "belajar" (*learning by doing*). Namun demikian alasan ini menghendaki dukungan organisasi riset (*research and development*) yang tangguh, yang sayangnya kurang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Dengan demikian sulit diharapkan inovasi-inovasi baru dalam industri tekstil khususnya, walaupun telah diberikan proteksi. Harus diingat bahwa setiap proteksi mengisyaratkan sejumlah biaya yang harus dibayar masyarakat berupa berkurangnya tingkat kemakmuran

²Penelitian empiris malahan mengungkapkan bahwa kenaikan impor tekstil MEE misalnya dari ASEAN secara keseluruhan menimbulkan efek ketenagakerjaan yang positif bagi MEE, seperti diungkapkan oleh Djisman S. Simandjuntak dalam *Suara Karya*, 5 Mei 1983. Lebih lanjut dikatakan bahwa ini mungkin terjadi karena sebagian dari penerimaan ekspor ASEAN dibelanjakan kembali untuk memperoleh barang modal, bahan baku dan penolong dari MEE. Dengan kata lain yang terjadi bukan penghancuran kesempatan kerja, melainkan adalah pergeseran sektoral.

dalam artian tertentu, yaitu pemindahan sebagian surplus konsumen dan pemerintah kepada pihak produsen dengan harapan dapat dihasilkan *externalities positif* (manfaat secara tak langsung) kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertimbangan kebijakan proteksi bagi industri tekstil hendaknya adalah kemampuan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar.

POTENSI INDUSTRI TEKSTIL

Produksi tekstil dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan sandang nasional, kecuali untuk beberapa jenis tertentu. Hal ini tampak dari pangsa (*share*) produksi domestik dalam penawaran sandang per kapita yang meningkat dari rata-rata 63% dalam tahun 1967-1979 menjadi 91% dalam tahun 1982/1983.³ Tetapi akhir-akhir ini keluhan timbul tentang kelesuan tekstil dalam negeri yang barangkali disebabkan antara lain oleh semakin selektifnya konsumen, di samping penurunan daya beli masyarakat karena resesi. Walaupun demikian masalah tersebut tidak dengan sendirinya berarti tertutupnya peluang untuk menggarap pasar domestik dengan berbagai cara, antara lain peningkatan mutu dan diversifikasi produk.

Tabel 2

NILAI EKSPOR TEKSTIL 1980/1981 - 1983/1984
(dalam juta US\$)

	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1. Golongan barang utama	4.143	2.728	2.483	3.277
2. Golongan barang lain (Tekstil)	1.444 134,8 (9,3%)	1.442 110,3 (7,6%)	1.445 160,4 (11,1%)	2.090 277 (13,3%)
3. Minyak	12.340	17.298	18.824	14.449
Jumlah (1 + 2 + 3)	22.885	22.994	18.672	19.816

Sumber: Diolah dari Nota Keuangan dan RAPBN 1985/1986.

³Lebih lanjut lihat *Business News*, 21 Januari 1985.

Di samping itu, industri tekstil sering disebut-sebut sebagai industri yang memberikan sumbangan besar bagi peningkatan ekspor non-migas, yang semakin diharapkan mengimbangi stagnasi penerimaan yang berasal dari minyak. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai ekspor tekstil semakin besar dibandingkan ekspor non-migas lain bukan golongan barang utama. Nilai ekspor tersebut naik dari US\$134,8 juta atau 9,3% dalam tahun 1980/1981 menjadi 13,3% dari keseluruhan golongan barang-barang lain non-migas pada tahun 1983/1984. Kecuali dari tahun 1981 ke 1982 terjadi penurunan ekspor tekstil dari 9,3% menjadi 7,6% dari keseluruhan ekspor barang lain. Namun demikian apabila dibandingkan dengan ekspor keseluruhan komoditi non-migas (termasuk golongan barang utama tetapi tidak termasuk minyak), pangsa ekspor tekstil relatif kecil, yaitu sekitar 5,2% dalam tahun 1983/1984.

PROTEKSIONISME: ARGUMEN INDUSTRI MUDA VS ARGUMEN INDUSTRI TUA

Menurut studi Bank Dunia, proteksi efektif (*tarif*) sektor industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia adalah sebagai berikut: pemintalan 71%, penenunan 117%, perajutan 403% dan pakaian jadi 124%. Dengan demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa semakin ke hulu proteksi semakin rendah dan semakin ke hilir semakin tinggi.⁴ Tingkat proteksi sedemikian adalah termasuk tinggi, relatif terhadap industri lain kecuali industri elektronika dan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu ada keharusan agar sesuai dengan argumen industri muda, industri tekstil membenahi diri sehingga akhirnya tingkat proteksi yang diberikan kepadanya menurun, berarti bahwa industri tersebut telah semakin mandiri.

Studi mengenai hasil kegiatan industri muda ini menunjukkan bahwa walaupun hanya sedikit bukti yang dapat diperoleh mengenai manfaat dan biaya industri muda ini, bahwa sangat banyak industri-industri muda yang ternyata memiliki tingkat pertumbuhan produktivitas yang sangat lamban. Penyelidikan ini mengajukan beberapa kesimpulan sementara tentang alasan-alasan kegagalan industri muda mencapai hasil yang diharapkan. Alasan utama yang diajukan adalah tingkat produktivitas mereka yang tidak cukup tinggi agar mampu bersaing dengan barang impor. Ini menunjukkan pula tidak adanya usaha untuk mencari metode produksi lebih baik ataupun meningkatkan kemampuan produksinya dengan cara penerapan teknologi baru.⁵

⁴*Business News*, 21 Januari 1985.

⁵M. Bell et al., "Assessing the Performance of Infant Industries," *World Bank Staff Working Paper*, No. 666, 1984.

Industri tekstil di Indonesia sejak semula menerima proteksi yang relatif besar, termasuk kebijakan subsidi yang diberikan melalui sertifikat ekspor dan lain-lain. Pemberian proteksi bagi industri tekstil perlu dikaji lebih lanjut. Apakah struktur proteksi yang ada saat ini, pada akhirnya memberikan manfaat bagi konsumen asing lebih besar relatif terhadap manfaat yang diterima di dalam negeri? Proteksi ini pada hakikatnya merupakan hambatan potensial apabila industri tersebut tidak sanggup melepaskan bantuan itu setelah masa kanak-kanaknya berlalu. Di satu pihak, proteksi ini memang bisa menjadi hambatan, karena mengakibatkan distorsi harga. Bhagwati dan Srinivasan berpendapat bahwa seringkali terjadi otomatisasi proteksi, yaitu penggunaan kuota dan tarif misalnya, segera setelah produksi domestik dimulai, disusul dengan eskalasi proteksi selanjutnya secara otomatis⁶ yang tidak terbatas. Dalam berbagai bentuknya distorsi harga pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam perekonomian suatu negara. Menurut salah satu studi Bank Dunia pada tahun 1970-an, tingkat distorsi harga memiliki korelasi negatif terhadap tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto.⁷ Tampaknya ini berlaku pula pada industri tekstil, yaitu dengan proteksi yang berlebihan serta berkepanjangan, sulit diharapkan tingkat pertumbuhan ataupun produktivitas yang tinggi sebagai akibat buruk dari distorsi harga.

Tidak jarang terjadi, insentif yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor misalnya, tidak dapat mengungguli pengaruh negatif akibat distorsi harga mata uang asing, sebagai contoh penilaian yang berlebihan mata uang kita terhadap mata uang asing, khususnya yang konvertibel dan kuat.

Di samping itu masih ada hambatan lain bagi perkembangan industri muda ini, yaitu yang menyangkut mutu dan jasa-jasa pendukung ekspor yang bersama-sama memperlemah daya saing Indonesia di pasar tekstil internasional.

Dari hasil studi Donald Keesing dan Martin Wolf⁸ secara umum dapat dikatakan bahwa neraca perdagangan tekstil dunia masih ditandai oleh surplus ekspor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang Asia. Di lain pihak, pakaian secara umum diekspor oleh negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Hal ini berlaku pula untuk Indonesia, yaitu sampai sekarang masih merupakan net importir tekstil. Pada tahun 1980 sampai 1983 misalnya, ekspor tekstil Indonesia bernilai antara US\$134,8 juta hingga

⁶Bhagwati dan Srinivasan, *Trade Policy and Development* (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1979), hal. 13.

⁷World Bank, *World Development Report 1983*, Oxford University Press, hal. 62 dst.

⁸D. Keesing dan M. Wolf, "Question on International Trade in Textiles and Clothing," *World Bank Reprint Series*, No. 202.

US\$350 juta. Di lain pihak, impornya mencapai nilai di atas US\$500 juta pada waktu yang sama, kecuali pada tahun 1983 menurun hingga US\$408,96 juta. Tampaknya alasan yang mendasari kecenderungan ini adalah keunggulan komparatif di samping faktor proteksi.

Khususnya untuk Indonesia, keunggulan komparatif dalam perdagangan tekstil belum dapat ditentukan secara pasti dan masih merupakan obyek studi. Tumbuhnya industri hulu (kimia dasar) yang menunjang industri tekstil kiranya merupakan faktor positif dalam memperkuat keunggulan komparatifnya. Namun demikian, ternyata industri tekstil Indonesia masih menggantungkan diri pada proteksi dan belum mampu menciptakan kaitan-kaitan dalam industrinya. Dewasa ini semakin besar kekhawatiran bahwa industri tekstil Indonesia berada di ambang kehancurannya. Di samping kelemahan-kelemahan yang ada di dalam struktur industri tersebut, ada pula faktor-faktor luar yang mengancam kelangsungan hidupnya.

Rezim perdagangan tekstil internasional yang berlaku sekarang dianggap suatu penyimpangan yang paling menyolok dan buruk dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Baik LTA (Long Term Arrangements) maupun MFA (Multi Fibre Arrangements) dipandang sebagai legalisasi proteksionisme.⁹ MFA yang sekarang dipandang sangat merugikan negara-negara berkembang yang sedang menggiatkan industri tekstilnya.

Semakin tangguh suatu negara berkembang dalam ekspor tekstilnya, semakin buruk perlakuan negara-negara maju atas dirinya. Perlakuan buruk ini merupakan semacam hukuman yang ditimpakan kepada negara-negara berkembang atas keberhasilan industri tekstil mereka.

MFA tampaknya merupakan hasil prakarsa MEE didukung negara-negara industri lainnya. Pembatasan impor dilakukan secara apriori, yaitu dilakukan sebelum terjadi kesulitan di dalam negeri pengimpor. Maksud pembatasan impor tekstil tersebut adalah untuk menghindari "gangguan pasar" dalam negeri mereka. Caranya adalah dengan membatasi impor tekstil dari negara-negara berkembang berdasarkan kepekaan produk-produk tekstil tersebut yang diukur atas dasar tingkat penetrasi impor dalam masing-masing kategori tekstil.

Pada dasarnya ada lima kelompok besar dan 114 kategori tekstil. Tingkat pertumbuhan impor dibatasi sekitar 0,2% untuk kelompok I (sangat peka); 1,2% untuk kelompok II (peka); dan sekitar 4% untuk kelompok III, IV dan V (kurang peka sampai tidak peka). Apabila tingkat pertumbuhan tersebut dilewati, maka negara pengimpor berhak mengenakan pembatasan kuantitatif atau kuota. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa MFA memiliki sejenis "otomatisme" dalam penggunaan kuota.

⁹Lihat lebih lanjut, "Rezim Perdagangan Tekstil MEE," *Suara Karya*, 4 Mei 1983.

Argumen yang dikemukakan oleh MEE untuk menghalalkan tindakan-tindakan proteksionismenya adalah argumen industri tua. Alasannya adalah bahwa peralihan struktural dari industri tekstil ke jenis industri lain yang lebih sesuai dengan perubahan karunia faktor produksi relatif yang dimiliki, membutuhkan waktu. Dengan demikian dianggap perlu tindakan proteksionis bagi industri tua yang semakin tidak efisien, paling tidak sampai industri baru yang kompetitif telah berdiri. MFA yang akan berakhir Juli 1986 ini adalah usaha untuk mendukung kebijakan tersebut.

Di lain pihak memang negara-negara berkembang juga melakukan tindakan proteksionis dengan argumen "industri muda" seperti telah dikemukakan di atas. Bedanya terletak pada kemampuan negara industri maju dan negara berkembang untuk mempengaruhi perdagangan tekstil internasional. Meskipun demikian dalam jangka panjang, menurut Keesing dan Wolf¹⁰ penekanan pada perdagangan tekstil internasional yang berlebihan kurang tepat dilaksanakan oleh negara-negara maju karena menyangkut pangsa yang relatif kecil dalam keseluruhan produksi. Memang negara-negara maju akan terus menghasilkan dan mengekspor tekstil dan produk-produknya tetapi industri tekstil mereka tersebut masih terlalu kecil untuk dapat mengancam punahnya industri yang sama di negara-negara berkembang. Biaya yang harus dibayarnya akan sangat mahal bila mereka bersikeras hendak melakukan hal itu demi melindungi industri tekstil dalam negerinya.

Walaupun demikian negara-negara MEE masih terus melakukan pembatasan impor tekstilnya, termasuk dari negara-negara berkembang. Sebagian kuota-kuota yang ditetapkan oleh MEE, termasuk bagi Indonesia adalah sedemikian kecilnya, sehingga tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai larangan impor yang terselubung. Tetapi Amerika Serikat misalnya, sebenarnya memiliki target proteksi terhadap Jepang, RRC, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan. Namun demikian, di lain pihak bagi Indonesia, kuota yang tersedia pun belum tentu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak mudah menajajaki mengapa negara-negara ASEAN misalnya, tidak dapat memanfaatkan kuota-kuota mereka sepenuhnya. Barangkali salah satu sebabnya adalah ukuran kuota yang tidak sebanding dengan biaya yang harus dipikul. Dugaan ini tampaknya beralasan sejauh yang dibicarakan adalah kuota impor Irlandia, Denmark, serta sebagian kuota negara-negara MEE lain. Akan tetapi argumen ini tidak dapat menjelaskan mengapa kuota yang cukup besar dari Jerman Barat juga tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Sebab kedua yang tampaknya berperan besar adalah prosedur impor MEE yang sangat berbelit-belit. Terutama untuk produk-produk yang termasuk dalam kelompok I dan II, MEE mengenakan apa yang disebut "Sistem Pengawasan Ganda." Berda-

¹⁰D. Keesing dan M. Wolf, *op. cit.*

sarkan sistem ini MEE tidak saja mengawasi perdagangan tekstil mereka, melainkan juga masing-masing negara pengekspor. Hal ketiga yang perlu disoroti adalah peranan rangkap dari produsen tekstil MEE sebagai importir.¹¹ Kiranya dalam kedudukan sebagai produsen tekstil sangat sulit diharapkan niat mereka untuk mengimpor, meskipun dengan syarat penawaran yang lebih menguntungkan.

TANTANGAN RESTRUKTURISASI INDUSTRI TEKSTIL NASIONAL

Sebagai konsekuensi pembatasan impor secara kuantitatif maka peng ekspor didesak untuk memusatkan diri pada jenis produk yang bernilai satuan tinggi dengan syarat penawaran yang lebih menguntungkan. Masalah bagi industri tekstil Indonesia adalah mampukah kita menghadapi tantangan tersebut dengan restrukturisasi. Kalau benar restrukturisasi merupakan langkah yang tidak terelakkan demi mempertahankan hidup industri tekstil kita, lalu restrukturisasi macam apa yang dibutuhkan?

Pertanyaan semacam itu tidak dapat dijawab dengan mudah karena menyangkut beberapa masalah kompleks, termasuk pertimbangan politis yang berada di luar jangkauan pembahasan tulisan ini. Sejauh lingkup pembahasan tulisan ini mengizinkan, ada beberapa alternatif tindakan restrukturisasi berdasarkan keadaan pasar dalam negeri dan persaingan internasional.

Salah satu cara restrukturisasi yang dapat ditempuh adalah melalui restrukturisasi dinamis yang dilakukan dalam kerangka keuntungan komparatif dinamis. Industri tekstil Indonesia dalam hal ini dituntut mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada di pasar dengan cara peningkatan metode produksi termasuk penggunaan teknologi untuk mengimbangi permintaan pasar yang selalu berubah. Tampaknya dalam jangka panjang cara ini yang paling menguntungkan karena industri tekstil nantinya akan tumbuh kuat dan mampu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap berubahnya keadaan pasar. Namun di lain pihak, dibutuhkan restrukturisasi total keseluruhan industri tekstil yang sudah barang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tampaknya pilihan yang terbaik ini masih berada di luar jangkauan industri tekstil Indonesia saat ini mengingat keterbatasan modal maupun kemampuan teknologinya. Sebagai perbandingan, negara-negara maju yang mengadakan restrukturisasi industri tekstil dengan cara ini pun masih belum keseluruhannya berhasil. Hal ini tampak pada perilaku industri tekstilnya yang masih banyak menggantungkan diri pada proteksi dengan alasan sedang dalam tahap penyesuaian dalam rangka proses restrukturisasi.

¹¹Lihat *Suara Karya*, 4 Mei 1985, *op. cit.*

Di lain pihak, restrukturisasi selektif menekankan perombakan parsial industri tekstil kita, dengan prioritas pengembangan sub-sektor yang memiliki prospek cerah, baik bagi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Konsekuensi pilihan ini adalah hilangnya beberapa sub-sektor industri tekstil yang tidak memiliki prospek baik atau tidak mampu beroperasi secara efisien, yang oleh karenanya tidak memiliki keunggulan komparatif. Dapat diperkirakan, bahwa pengambilan kebijakan semacam ini akan ditentang oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, walaupun secara makro keseluruhan masyarakat diuntungkan. Restrukturisasi mencakup kegiatan yang sangat luas seperti perubahan kebijakan, perubahan alat-alat produksi atau penggunaan teknologi, faktor pendanaan, mekanisme pemasaran, dan pengadaan bahan baku. Di samping itu restrukturisasi perlu dilaksanakan dalam kerangka perencanaan terpadu dengan kebijakan industri dan perdagangan pada umumnya.

Studi mengenai restrukturisasi industri tekstil Indonesia sedang dilaksanakan atas kerjasama pemerintah dan Bank Dunia. Studi tersebut telah dimulai pada bulan Desember 1983 dengan dana sejumlah US\$250 ribu dari Bank Dunia dan US\$150 ribu dari pihak Pemerintah Indonesia. Hasil studi tahap pertama direncanakan akan selesai bulan Juni 1985 dan secara keseluruhan diharapkan selesai kwartal pertama tahun 1986.¹² Hasil studi ini nantinya akan sangat penting bagi perkembangan industri tekstil Indonesia pada umumnya karena menyangkut segala aspek kehidupan tekstil. Termasuk pula penghapusan ataupun pengurangan proteksi tekstil sangat tergantung pada kebijakan restrukturisasi. Oleh sebab itu pertimbangan utama segala kebijakan pertekstilan hendaknya faktor biaya dan manfaat yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara ekonomis dan bukannya demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja.

Dewasa ini masalah tekstil banyak ditulis dalam mass media. Masing-masing kelompok masyarakat mencoba mencari dukungan terhadap masalah pertekstilan yang sedang dihadapinya. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap kelompok akan bersuara sesuai dengan kepentingannya. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai orientasi restrukturisasi industri tekstil nasional. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa orientasi restrukturisasi hendaknya untuk ekspor. Di lain pihak ada pula yang berpendapat bahwa orientasi semacam ini adalah salah, dengan alasan bahwa perkembangan pasar internasional tidak bisa dipengaruhi karena unsur-unsurnya tidak berada di bawah kekuasaan kita.¹³ Dinyatakan lebih lanjut bahwa restrukturisasi berdasarkan ekspor berbahaya karena ada kemungkinan pada saat restrukturisasi telah selesai, tuntutan pasar internasional juga berubah termasuk kebijakan pro-

¹²Lihat, "Bagaimana Restrukturisasi Industri Tekstil," *Suara Karya*, 31 Mei 1985.

¹³Lihat Tajuk Rencana, *Suara Karya*, 4 Juni 1985.

teks dan kuotanya. Oleh sebab itu restrukturisasi dengan orientasi pasar dalam negeri dianggap lebih aman oleh sementara orang.

Perbedaan pendapat semacam ini timbul karena perbedaan segi pandang yang bersumber pada perbedaan kepentingan pula. Orientasi restrukturisasi industri tekstil sebenarnya lebih penting pada peningkatan kemampuan industri tekstil beroperasi dengan produktivitas tinggi tanpa menggantungkan diri pada berbagai proteksi, dengan demikian produknya mampu bersaing di pasar internasional. Orientasi hanya pada pasar domestik saja dapat membawa kita pada kesulitan-kesulitan seperti yang dialami oleh industri tekstil Indonesia saat ini. Setiap perlengkapan proteksi pada dasarnya memperlemah persaingan yang pada umumnya memang tidak pernah sempurna dan juga mempertinggi ketidakefisienan. Kalau keadaan semacam ini bisa diatasi, tidak perlu mempermasalahkan pasar mana yang akan dituju, karena apabila pasar dalam negeri mengalami kejenuhan, kita dapat menembus pasar luar negeri.

Kajian atas permasalahan tekstil di dalam negeri masih memberikan harapan-harapan baru. Kesulitan-kesulitan yang timbul karena kurang efisiennya pengelolaan industri akibat beberapa tindakan proteksi kiranya perlu ditelusuri dan dibenahi. Studi restrukturisasi diharapkan akan mampu memberikan masukan-masukan bagi pembuatan kebijakan yang tepat. Rumusan kebijakan yang tepat lebih lanjut diharapkan mampu menumbuhkan industri tekstil yang tangguh. Di lain pihak, perdagangan tekstil internasional memang belum menunjukkan prospek yang cerah karena keterikatan Indonesia dalam MFA. Kiranya perlu dirintis cara pendekatan yang lebih sesuai terhadap negara-negara maju, misalnya terhadap Amerika Serikat, yang merupakan pengimpor tekstil Indonesia yang cukup besar, yaitu mencapai sekitar 40% dari keseluruhan ekspor kita. Rupanya, kita harus belajar hidup dengan kenyataan ini di samping tetap mengadakan studi yang lebih mendalam termasuk cara diplomasi yang tepat dalam rangka menembus pasar internasional.